

Saudi Resmi Buka Akses Umrah Mandiri bagi Jemaah RI

Jemaah Haji Indonesia Bakal Pakai Desain Batik Baru

JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan nota diplomatik terkait penyelenggaraan umrah. Inti suratnya, masyarakat Indonesia sudah bisa melaksanakan umrah secara mandiri atau pribadi tanpa harus mengikuti paket travel atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah.

Layanan untuk bisa berumrah secara mandiri itu bisa diakses masyarakat Indonesia sejak kemarin (5/11) melalui aplikasi atau sistem Nusuk Umrah di laman www.umrah.nusuk.sa milik Saudi. Calon jemaah tinggal menentukan lokasi kedatangan di Makkah atau Madinah, kemudian menentukan jumlah rombongan dan kewarganegaraan, yang tentunya diisi Indonesia.

Pada simulasi untuk keberangkatan 19 November, terdapat beberapa paket umrah yang tersedia. Semuanya tersaji dalam mata uang riyal. Paling murah 1.500 riyal atau sekitar Rp 6,6 juta untuk lima malam. Paket tersebut



SALMAN TOYIBU/JAWA POS

Mochamad Irfan Yusuf

meliputi akomodasi atau hotel di Makkah, layanan umrah, katering, dan transportasi lintas kota.

Harga itu di luar ongkos penerbangan. Biaya penerbangan juga bisa dipesan sekaligus atau terpisah. Paket yang bernama Premium Package 13 Dar Al Taqwa itu juga menawarkan paket tur ke Jabal Nur dan Gua Hira.

Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha mengatakan, dibukanya akses umrah mandiri itu merupakan inovasi digital Saudi yang perlu diapresiasi. "Kami menyambut baik kebijakan yang disampaikan melalui nota diplomatik itu," katanya di Jakarta kemarin.

Ichsan menambahkan, kebijakan Saudi soal umrah mandiri itu akan diintegrasikan dengan

regulasi yang berlaku di Indonesia. Seperti diketahui, di Undang-Undang Haji dan Umrah yang terbaru, pemerintah sudah mengizinkan adanya umrah mandiri. Integrasi aturan itu penting untuk memastikan perlindungan optimal bagi jemaah serta ekosistem yang berkeadilan bagi travel umrah di Indonesia.

Dominan Biru Muda dan Putih

Dalam kesempatan itu, Ichsan juga menyampaikan, jemaah haji Indonesia tahun depan akan mendapatkan batik dengan desain baru. Sebelumnya, batik haji berwarna dominan ungu. Untuk desain yang terbaru, batik yang akan digunakan berwarna biru muda dan putih.

Ichsan mengatakan, penggunaan batik khas Nusantara itu menjadi simbol hadirnya Indonesia di momen akbar tersebut. "Tujuannya, bisa menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia adalah negara yang ramah dan mempunyai khazanah budaya yang kuat. Selain itu, batik haji juga bisa menumbuhkan industri tekstil nasional," katanya. (wan/ttg)

PERLU
PERHATIAN:
Banyak
pedagang di
sentra PKL
Gajah Mada
berpindah
lokasi
berjualan
karena
jumlah
pengunjung
terus
menurun.



Jawa Pos

Ditinggal Pedagang, Sentra PKL Gajah Mada Semakin Sepi

Dari 80 Lapak, Hanya 42 yang Masih Buka

SIDOARJO – Sentra PKL Gajah Mada kian sepi. Dari 80 lapak yang dulunya diisi penjual, kini tersisa 42 yang masih buka. Pedagang memilih berpindah lokasi karena sentra ditinggal pembeli.

Salah satu pedagang yang bertahan, Wahyuni mengatakan jika banyak pedagang tak mampu berjualan karena pembeli terus menurun.

Wahyuni memilih bertahan. Meski, secara pendapatan terus menurun. Saat ini dia fokus berjualan pada akhir pekan yang jumlah pengunjungnya masih lumayan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Din-

kop UM) Sidoarjo Amat Adi Subhan, mengatakan saat peresmian pada 2019 lalu seluruh stan terisi penuh oleh para PKL yang sebelumnya berjualan di sepanjang Jalan Gajahmada. "Tahun 2019 semua kita pindahkan ke sini dengan fasilitas listrik dan air juga gratis," jelasnya.

Menurut dia, penurunan aktivitas di sentra kuliner itu mulai terjadi sejak pandemi COVID-19. Adi mengatakan, Dinkopum dan OPD lainnya akan berupaya meramaikan lagi sentra PKL Gajah Mada. "Setelah ada appraisal, tempat kosong akan kita lelang untuk UMKM," pungkasnya. Dinkopum berencana untuk menghidupkan kembali kawasan tersebut, mulai dari menggelar event kuliner hingga melelang stan kosong. (eza/hen)

ANGGER BONDAN/JAWA POS

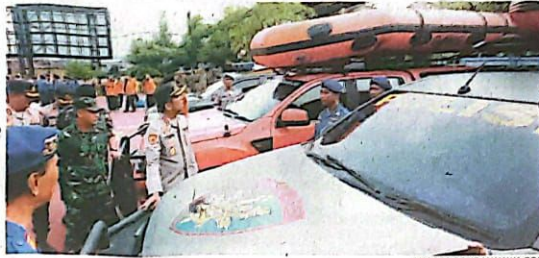
Delapan Kecamatan Masih Rawan Banjir

Paling Sering di Waru, Tanggulangin, dan Taman

SIDOARJO – Bersamaan intensitas hujan yang semakin tinggi, BPBD Sidoarjo memetakan daerah mana saja yang berpotensi dilanda bencana hidrometeorologi. Ada delapan kecamatan yang masuk kategori wilayah rawan banjir. Yakni Kecamatan Jabon, Porong, Tanggulangin, Candi, Buduran, Sedati, Waru, dan Taman.

Dari delapan wilayah itu ada tiga kecamatan yang paling sering dilanda banjir. Yakni Tanggulangin, Waru, dan Taman. Ketinggian tanah yang rendah mendorong terjadinya genangan di wilayah-wilayah tersebut.

Plt Kepala BPBD Sidoarjo Sabino Mariano mengatakan, wilayah rawan banjir



CEK KESIAPAN: Kapolresta Sidoarjo Komberspol Christian Tobing melihat kondisi peralatan yang dipakai personil kepolisian untuk menangani bencana. Apel dilakukan bersama instansi terkait.

tersebut ditentukan berdasarkan hasil pemantauan dan laporan kejadian yang dihimpun dari Januari hingga Oktober 2025. "Banjir bisa diprediksi lokasinya. Namun untuk angin tak bisa karena menyerang secara *random*," kata Sabino kemarin (5/11).

Berdasarkan data BPBD Sidoarjo, sepanjang Januari hingga Oktober 2025 tercatat ada 764 kejadian bencana dan penyelamatan evakuasi. Dari jumlah itu, sebanyak 28 di antaranya merupakan bencana alam. Banjir terjadi 12 kali. Sedangkan angin kencang 16 kali.

Akibat bencana hidrometeorologi tersebut, sedikitnya 183 rumah warga dan empat fasilitas umum mengalami kerusakan. Selain itu tiga sekolah turut terdampak. Ada tiga warga yang mengalami luka berat akibat bencana. Banjir telah merendam 400 lebih rumah di Kota Delta.



Banjir bisa diprediksi lokasinya. Namun untuk angin tak bisa karena menyerang secara *random*."

Sabino Mariano
Plt Kepala BPBD Sidoarjo

Apel Kesiapsiagaan Bencana

Secara terpisah, Polresta Sidoarjo juga menggelar apel siaga tanggap bencana hidrometeorologi kemarin (5/11). Kegiatan itu juga diikuti perwakilan instansi terkait. Mulai Kodim 0816 Sidoarjo, Satpol PP, Dishub, dan BPBD.



Total ada 764 kejadian selama 10 bulan

- Angin kencang masih mendominasi dengan 16 kejadian
- Banjir berada di urutan kedua yakni sebanyak 12 kejadian
- Angin kencang menyebabkan 183 rumah rusak
- Sebanyak 400 rumah terimbas bencana banjir.

GRAFIS: MERLAMBAH/JAWA POS

Kapolresta Sidoarjo Komberspol Christian Tobing menyatakan, apel itu digelar dalam rangka memastikan kesiapan personel. Termasuk sarana dan prasarana dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana alam. "Harapannya semua personel instansi siap," ujar Tobing. **(eza/edi/hen)**

Jawa Pos

Digarap sejak Juli, Progres RSUD Sedati Masih 13 Persen

SIDOARJO – Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati mendapat sorotan. Proyek rumah sakit di wilayah timur itu dinilai berjalan lambat. Digarap mulai Juli 2025, saat ini pembangunannya masih 13 persen.

Berdasarkan laporan evaluasi mingguan, keterlambatan pekerjaan terbilang signifikan. Pada minggu ke-13 yakni 14 sampai 20 Oktober 2025 seharusnya progres mencapai 42,04 persen. Namun realisasi di lapangan baru 8,57 persen.

Sedangkan minggu ke-14 atau periode 21 sampai 27 Oktober 2025, dari target sebesar 50,99 persen baru tercapai

10,53 persen. Sehingga keterlambatan pekerjaan mencapai lebih dari 40 persen dari jadwal yang direncanakan. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Sidoarjo dr Rahmi Afiyanti mengakui bahwa hasil pemantauan di lapangan memang menunjukkan progres yang masih jauh dari target.

Kontraktor Optimistis Penuhi Target

Meski begitu, pihak kontraktor tetap optimistis bisa mengejar keterlambatan pekerjaan tersebut. "Kontraktor menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Target mereka, perte-

ngahan Desember nanti progres bisa mencapai 75 persen," ujar Rahmi kemarin (5/11).

Rahmi mengungkapkan, jika pengerjaan tidak sesuai dengan target yang tercantum dalam kontrak, maka akan ada konsekuensi sesuai ketentuan. Pemkab akan melakukan pengawasan.

Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana berharap pembangunan rumah sakit yang sudah lama dinantikan warga Sedati itu bisa segera rampung tanpa harus menunggu perpanjangan waktu. "Kalau tidak selesai sesuai jadwal, tentu ada mekanisme otomatis yang berlaku di dalam kontrak," ujarnya. (eza/hen)



ANGGER BONDAN/JAWA POS

TERUS DIKEBUT: Proyek RSUD Sedati mendapat sorotan setelah dinilai lambat progresnya. Pemkab bakal mengawasi pembangunannya secara ketat dan siap menindaklanjuti persoalan jika terlambat selesai.

Jawa Pos



DOKUMEN SMAN 2 SIDOARJO

MULAI UJIAN: Siswa SMAN 2 Sidoarjo melaksanakan TKA kemarin (5/11). Kepala sekolah terus mengupayakan agar listrik dan internet aman.

Sekolah Larang Siswa Live TKA di Medsos

Agar Tidak Ganggu Ketertiban

SIDOARJO – Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) gelombang kedua tingkat SMA di Sidoarjo dimulai kemarin (5/11). Ada beberapa atensi yang diberikan untuk para siswa. Mereka dilarang melakukan siaran langsung di medsos saat mengerjakan soal agar tidak mengganggu ketertiban.

Kepala SMAN 1 Sidoarjo Eko Redjo menegaskan jika larangan siaran langsung disampaikan sebagai upaya memperketat pengawasan. Itu juga karena masih adanya potensi siswa yang belum tertib. "Kami sudah briefing pengawas dan panitia berulang kali agar hal-hal seperti itu tidak

terjadi," ujarnya.

Di SMAN 1 Sidoarjo, lanjut Eko, ada 480 siswa yang mengikuti asesmen dalam satu gelombang dengan tiga sesi setiap harinya. "Kami sudah melakukan simulasi beberapa kali dan semua sistem aman," tambah Eko.

Kepala SMAN 2 Sidoarjo Ristiwi Peni menambahkan jika di sekolahnya ada 470 siswa kelas XII yang mengikuti asesmen. Sekolah juga berkoordinasi dengan PLN dan Telkom terkait listrik dan internet.

Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Sidoarjo Kiswanto mengatakan bahwa TKA di Sidoarjo belum terjadi laporan kendala teknis. "Kami pantau dan tiap kepala sekolah diharapkan melaporkan jika ada kendala," katanya. (eza/hen)

Jawa Pos

Kemenkum Jatim

Beri Pendampingan Ponpes Al Khoziny

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan dan solusi hukum dalam percepatan pembangunan Pesantren Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo. Langkah ini disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukamto, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Pesantren Al Khoziny yang digelar di Kantor Pertanahan Sidoarjo, Rabu (5/11).

Rapat yang dihadiri sejumlah instansi terkait ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan akan melakukan ground breaking pembangunan pada 25 November 2025. Dari Kanwil Jatim hadir pula Kadiv Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko dan Plt. Kabid AHU R. Prasetyo Wibowo.

Dalam pertemuan tersebut, Haris Sukamto menyampaikan bahwa Kementerian Hukum telah menelusuri data awal Yayasan KH Abdul Mujib Abbas Al Khoziny yang pernah terdaftar sejak 2016 melalui SK AHU-0001972.AH.01.04 Tahun 2016. Namun, karena yayasan belum memenuhi kewajiban pelaporan beneficial ownership, status hukumnya kini terblokir. "Kami akan memberikan pendampingan penuh agar status hukum yayasan dapat segera dipulihkan. Ini penting supaya seluruh proses administrasi pembangunan pesantren bisa berjalan tanpa hambatan," ujar Haris.

Ia juga menekankan bahwa Kemenkum Jatim siap memfasilitasi percepatan pembukaan blokir dan penyempurnaan dokumen pendirian yayasan. Langkah ini diharapkan menjadi dasar hukum yang sah bagi pengelolaan lahan dan pelaksanaan bantuan pemerintah di lokasi pesantren.

Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo, Nursuliantoro, mengapresiasi perhatian langsung Kemenkum Jatim terhadap persoalan hukum yang dihadapi pihak pesantren. "Rapat ini menjadi penting karena berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan ground breaking oleh Presiden," ujarnya.

Pengasuh Pesantren Al Khoziny, Kyai Muchammad Ubaidillah, menyatakan tengah berupaya memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administratif, dengan bantuan notaris Ismaryani. Ia berharap dukungan lintas instansi, termasuk Kemenkum Jatim,

dapat mempercepat proses legalisasi dan relokasi pesantren ke lokasi baru di Jalan Antartika, Desa Siwalanpanji. (cat/rus)



Rapat di Kanwil Kemenkum Jatim, kemarin

✓ Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Memasuki musim hujan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap terjadinya bencana alam, digelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di Mako Polresta Sidoarjo, pada Rabu (5/11/2025).

Apel dipimpin Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing didampingi Dandim 0816 Sidoarjo Letkol. Czi. Shobirin Setio Utomo, dengan peserta apel gabungan terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, BPBD, SAR, Damkar dan stake holder terkait lainnya.

Melalui apel bersama ini bertujuan untuk pengecekan terhadap kesiapan para personel, maupun sarana prasarana dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap bencana alam.

“Diharapkan seluruh personel dan stake holder terkait dapat bersinergi, sigap, cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana alam demi menjamin terlindunginya keamanan dan keselamatan masyarakat,” jelas Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing.

Ia juga menyampaikan data dari BMKG, saat ini 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan. Dimana puncaknya secara bertahap berlangsung dari November 2025 hingga Januari 2026.

Meningkatnya curah hujan tersebut berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung hingga gelombang air laut yang tinggi. Selain itu juga perlu diwaspadai potensi terjadinya fenomena La Nina yang diperkirakan BMKG akan berlangsung hingga Februari 2026. (cat/rus)



Kapolresta Sidoarjo Kombes. Pol. Christian Tobing bersama Dandim 0816 Sidoarjo Letkol. Czi. Shobirin Setio Utomo, di apel gabungan, kemarin.

Pertamina Buka Posko Aduan di SPBU Jenggolo

Motor Brebet Usai Isi Peralite

KOTA-Pertamina membuka pos-

ko aduan di SPBU Jenggolo bagi warga yang mengeluhkan motor mereka bermasalah (brevet) usai mengisi Peralite. Sejak pekan lalu, posko tersebut sudah menerima beberapa laporan dari pengendara.

Staf Posko Aduan SPBU Jenggolo, Kurniawan,

menyebutkan bahwa laporan mulai berdatangan sejak Selasa (28/11) lalu. Jumlahnya tidak banyak, rata-rata hanya tiga sampai lima laporan per hari, dan itupun tidak setiap hari.

"Cuma mereka terkendala karena tidak meminta bukti nota pembelian,

● Ke Halaman 10



DIAKOMODIR: SPBU Jenggolo sediakan posko aduan bagi pengendara yang motornya brevet akibat isi ulang Peralite.

Pertamina Buka Posko...

kebanyakan juga bukan pengisi di SPBU sini," ucap Kurniawan.

Setiap pengadu diwajibkan membawa sejumlah dokumen pendukung sebagai syarat pelaporan, meliputi

nota pembelian Peralite, nomor kendaraan, surat-surat kendaraan, dan penjelasan jenis keluhan.

Jika sudah lengkap, pelapor akan diberikan blanko untuk proses lebih lanjut.

Nantinya, proses klaim ganti ru-

gi akan dilakukan langsung melalui Pertamina di Surabaya. Bagi pengendara yang sudah sempat melakukan servis mandiri, mereka bisa mengajukan ganti rugi dengan membawa blanko laporan dari posko. (sai/vga)



Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi



ANTISIPASI: Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing melakukan pengecekan sarpras.

Kapolresta Tegaskan Sinergi dan Respons Cepat

Menjelang puncak musim hujan, Polresta Sidoarjo bersama Kodim 0816, pemerintah daerah, dan sejumlah instansi terkait menggelar Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di halaman Mako Polresta Sidoarjo, Rabu (5/11) pagi.

Diky Putra Sansiri, Wartawan Radar Sidoarjo

APEL yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing dan didampingi Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo ini diikuti ratusan peserta. Mereka terdiri dari unsur Polri, TNI, Satpol PP, BPBD, Dishub, SAR, Damkar, serta berbagai stakeholder penanganan bencana.

Kapolresta Sidoarjo menyampaikan, apel ini merupakan langkah konkret untuk memastikan kesiagaan seluruh unsur dalam

● Ke Halaman 10





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Gelar Apel...

menghadapi potensi bencana hidro-meteorologi.
"Apel ini kami gelar untuk melakukan pengecekan dan pengontrolan terhadap kesiapan sumber daya manusia, serta

sarana dan prasarana yang dimiliki," ujar Kombes Pol Christian Tobing.
Ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga gelombang tinggi.

Menurutnya, kesiapsiagaan yang solid hanya dapat terwujud jika seluruh instansi berkoordinasi secara cepat dan efektif.
"Kami menekankan pentingnya koordinasi cepat dan komunikasi efektif. Bila terjadi bencana, respon harus

dilakukan secepat mungkin sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), termasuk dalam penanganan di lapangan," tegasnya.
Berdasarkan data BMKG, sekitar 43,8 persen wilayah Indonesia telah memasuki musim hujan dengan

puncaknya diperkirakan terjadi pada November 2025 hingga Januari 2026. Kondisi ini berpotensi menimbulkan bencana, terlebih dengan adanya fenomena La Nina yang diprediksi berlangsung hingga Februari 2026. (dik/vga)



DIBAHAS: Kemenkum Jatim memberikan pendampingan dan solusi hukum dalam percepatan pembangunan Ponpes Al Khoziny.

Presiden Akan Groundbreaking Ponpes Al Khoziny

KANTOR Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan dan solusi hukum dalam percepatan pembangunan Pesantren Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo.

Kepala Kanwil Kemenkum Jatim, Haris Sukanto, menyampaikan langkah ini dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pembangunan Pesantren Al Khoziny yang digelar di Kantor Pertanahan Sidoarjo, Rabu (5/11). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang direncanakan akan melakukan groundbreaking pembangunan pada 25 November 2025.

Haris Sukanto menjelaskan bahwa Yayasan KH Abdul Mujib Abbas Al Khoziny yang terdaftar sejak 2016 kini berstatus terblokir karena belum memenuhi kewajiban pelaporan beneficial ownership.

"Kami akan memberikan pendampingan penuh agar status hukum yayasan dapat segera dipulihkan. Ini penting supaya seluruh proses administrasi pembangunan pesantren bisa berjalan tanpa hambatan," ujar Haris.

Ia menekankan, Kemenkumham Jatim siap memfasilitasi percepatan pembukaan blokir dan penyempurnaan dokumen pendirian yayasan. Langkah ini krusial sebagai dasar hukum yang sah bagi pengelolaan lahan dan pelaksanaan bantuan pemerintah di lokasi pesantren.

Kepala Kantor Pertanahan Sidoarjo, Nursuliantoro, mengapresiasi perhatian langsung Kemenkumham





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Presiden Akan...

Jatim terhadap persoalan hukum yang dihadapi pihak pesantren, mengingat pentingnya kesiapan pelaksanaan groundbreaking oleh

Presiden.

Pengasuh Pesantren Al Khoziny, Kyai Muchammad Ushaidillah, menyatakan tengah berupaya memenuhi seluruh persyaratan hukum dan administratif. Ia berharap dukungan lintas instansi,

termasuk Kemenkum Jatim, dapat mempercepat proses legalisasi dan relokasi pesantren ke lokasi baru di Jalan Antartika, Desa Siwalanpanji. Sebagai tindak lanjut, Kemenkum Jatim akan berkoordinasi dengan

notaris untuk memastikan yayasan dapat segera diaktifkan kembali dengan nama baru, Yayasan Al Khoziny Buduran Sidoarjo. Selain itu, surat permohonan pelepasan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) juga akan

diteruskan ke pemerintah pusat. Melalui langkah ini, Kemenkum Jatim menegaskan perannya sebagai fasilitator percepatan pemajuan hukum bagi lembaga pendidikan keagamaan di daerah. (dik/vga)



Polemik Tembok Perumahan, Bupati Tunda Keputusan Seminggu

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memfasilitasi pertemuan seluruh pihak terkait polemik tembok pembatas di kawasan Perumahan Mutiara Regency, Mutiara City, dan Mutiara Harum yang berbatasan dengan Desa Banjarbendo dan Desa Jati.

Audiensi yang digelar di ruang Ops Room Kantor Bupati Sidoarjo, menyepakati keputusan final akan diambil pekan depan setelah Bupati memberikan kesempatan musyawarah terakhir kepada warga.

Pertemuan penting tersebut dipimpin Asisten II Sekda Sidoarjo M. Mahmud dan dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo



BELUM FINAL: Bupati Sidoarjo Subandi bersama Forkopimda saat membahas polemik tembok perumahan.

Subandi, Kapolresta Kombespol Christian Tobing, Dandim Letkol Shobirin

Setiyo Utomo, serta perwakilan Kejaksaan Negeri dan Dinas Perhubungan

Jawa Timur. Sejumlah perangkat daerah terkait

● Ke Halaman 10





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pertamina Buka Posko...

kebanyakan juga bukan pengisi di SPBU sini," ucap Kurniawan.

Setiap pengadu diwajibkan membawa sejumlah dokumen pendukung sebagai syarat pelaporan, meliputi

nota pembelian Peralite, nomor kendaraan, surat-surat kendaraan, dan penjelasan jenis keluhan.

Jika sudah lengkap, pelapor akan diberikan blanko untuk proses lebih lanjut.

Nantinya, proses klaim ganti ru-

gi akan dilakukan langsung melalui Pertamina di Surabaya. Bagi pengendara yang sudah sempat melakukan servis mandiri, mereka bisa mengajukan ganti rugi dengan membawa blanko laporan dari posko. (sai/vga)



Polemik Tembok Pembatas antara Jalan Perumahan dan Desa Warga Diberi Waktu Berpikir Sepekan

Sidoarjo, Memorandum

Usai memfasilitasi pertemuan seluruh pihak terkait polemik tembok pembatas di kawasan Perumahan Mutiara Regency, Mutiara City, dan Mutiara Harum yang berbatasan dengan Desa Banjarbendo dan Desa Jati, Pemkab Sidoarjo berencana mengambil keputusan pekan depan.

Dalam pertemuan yang dipimpin Asisten II Sekdakab M Mahmud dan dihadiri Bupati Subandi, Kapolresta Kombespol Christian Tobing, Dandim 0816 Letkol Shobirin Setiyo Utomo, serta perwakilan kejaksaan dan dinas perhubungan(dishub) provinsi itu, muncul kesepakatan agar fasilitas itu benar-benar difungsikan untuk publik.

Kepala DPUCKTR Bachruni Aryawan menjelaskan, jalan di kawasan tersebut memang telah menjadi bagian dari prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang diserahkan pengembang kepada pemerintah daerah. "Artinya, pengelolaan dan kewenangan jalan berada di tangan pemkab," katanya.

Namun, perwakilan warga Mutiara Regency, Sutrisno menyatakan, tembok pembatas sudah berdiri lama. "Tembok itu sudah ada sebelum kami membeli rumah. Jadi tidak benar kalau warga disebut menutup jalan," ujarnya.

Sekretaris RW Mutiara Harum, Alex bahkan menegaskan warga mendukung integrasi antarperumahan dan wilayah sekitar. "Kami ingin ikut



Warga perumahan melontarkan uneg-unegnya terkait polemik tembok pembatas dengan Desa Banjarbendo dan Jati.

berpartisipasi demi kemaslahatan dan kemajuan bersama," katanya.

Kepala Desa Jati Ilham mengungkapkan, pernah ada aduan jalan sering macet jika pagi dan sore hingga anak ngaji yang tertabrak mobil. Surat itu datang dari warga desa, bukan perumahan. Intinya minta jalan penghubung perumahan dan desa-desa bisa difungsikan untuk mengurai kemacetan. "Kalau itu jalan kabupaten, kami minta kebijaksanaan agar orang tua tidak khawatir," kata Ilham.

Bupati menyampaikan, hasil pembahasan sementara menunjukkan jalan yang dipersoalkan merupakan PSU yang telah menjadi aset pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, jalan seharusnya dapat difungsikan untuk kepentingan publik. "Kalau kita melihat dari aturan undang-undang yang telah dipaparkan semuanya

tadi, serta masukan dan penjelasan dari berbagai pihak terkait tadi, untuk integrasi, jalan tersebut harus dibuka," katanya.

Masing-masing telah menyampaikan pandangan dengan jelas. Keputusan sebenarnya dapat diambil setelah semua forkopimda setuju. Namun, bupati tetap menghormati warga Perumahan Mutiara Regency sehingga diberi kesempatan selama 1 minggu untuk berpikir dan bermusyawarah kembali.

Jika memang hendak mendatangkan ahli hukum atau ahli yang lain, Subandi mempersilakan. "Tidak ada istilah bupati memihak sana atau memihak sini. Saya sebagai bupati tidak ingin keputusan saya nanti menyakiti warga saya sendiri. Satu minggu lagi, silakan kalau ada kajian, kita dengarkan. Satu minggu lagi kita rapat lagi," ungkap Subandi. (kri/san/epe)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Bupati Subandi

Tegaskan Sinergi Forkopimda, Siap Tindaklanjuti Arahan Gubernur

SIDOARJO - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari tingkat provinsi hingga kecamatan.

Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan, kerukunan, dan ketertiban di seluruh wilayah Jawa Timur.

Pernyataan tersebut disampaikan Khofifah saat membuka Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa sore (4/11/25).

Kegiatan ini dihadiri jajaran lengkap Forkopimda Plus Jatim, termasuk Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi, serta seluruh unsur Forkopimda kabupaten/kota dan Forkopimcam.

Bupati Sidoarjo H. Subandi hadir bersama jajaran Forkopimda dan Forkopimcam yang turut mengikuti jalannya rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor di daerah.

Dalam arahannya, Khofifah menyoroti dua isu krusial di bidang hukum dan keamanan. Pertama,



Bupati Sidoarjo Subandi hadir rakor Forkopimda Jatim.

ia mendorong penguatan Rumah Restoratif Justice yang dijalankan Kejaksaan Negeri bersama pemerintah daerah.

"Rumah restoratif justice tidak hanya menyelesaikan masalah

jangka pendek, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang," jelasnya.

Kedua, Gubernur memberikan atensi khusus pada ancaman penyalahgunaan narkoba, yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa

(extraordinary crime). Ia meminta seluruh jajaran agar tidak meremehkan ancaman ini di semua lini.

"Jangan pernah underestimate baik produksi, peredaran, maupun penyalahgunaannya. Kita perlu

memperkuat fasilitas rehabilitasi dan menambah jumlah Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL)," tegas Khofifah.

Selain itu, Khofifah juga menekankan perlunya pembagian peran yang terkoordinasi dalam menjaga ketahanan pangan di Jawa Timur.

"Program pangan harus sinergis. TNI AD fokus pada padi, Kepolisian pada jagung, dan TNI AL pada kedelai-pajali. Semua harus syukur dan dikordinasikan dengan kepala daerah," pungkasnya.

Usai kegiatan, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo siap menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur dengan memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayahnya.

"Seperti pesan Gubernur Jatim, kita akan memperkuat kolaborasi Forkopimda hingga ke level kecamatan. Ketahanan wilayah bukan hanya soal keamanan, tetapi juga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat," ujar Subandi.

Subandi menambahkan, komitmen Forkopimda Sidoarjo adalah memastikan keamanan wilayah tetap terjaga sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sinergi program antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya. • **Loe**

Editor: Imam Ghazali | Layout: Yudi

DAFTAR

Warga Mutiara Regency Siapkan Kajian Dan Langkah Hukum Tolak Pembongkaran Pagar Pembatas



SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Tenggat waktu sepekan yang diberikan Bupati Sidoarjo H.Subandi, kepada warga perumahan Mutiara Regency untuk memberikan kajian hukum penolakan pembongkaran pagar pembatas perumahan, ditanggapi cepat warga perumahan Mutiara Regency. Suhartono ketua RW 16 Perumahan Mutiara Regency saat menggelar jumpa pers pada Rabu (5/11/2025) pagi, menyatakan warga sudah meminta bantuan kepada Urip Prayitno SH.MH selaku tim hukum, untuk menyiapkan kajian hukum dan akademis, sebagai mana yang diminta kepala daerah dalam rapat sebelumnya. “Kita bergerak cepat dengan mengumpulkan warga perumahan Mutiara Regency sekaligus tim hukum, untuk menjawab keinginan Bupati Sidoarjo. Akan kita berikan berbagai pertimbangan kepada Bupati, kenapa warga menolak rencana integrasi jalan itu,” ujar Suhartono.

Masih menurut Suhartono, selain memberikan pertimbangan hukum, warga juga siap melakukan upaya hukum, jika nantinya pembongkaran tembok itu benar-benar dilakukan tanpa melihat masukan dari warga perumahan Mutiara Regency. “Kita akan siapkan upaya menempuh jalur hukum itu, dengan pertimbangan nanti dari tim hukum yang ada. Karena sekali lagi, kita menolak adanya pembongkaran tembok Perumahan,” ucapnya. Sementara itu Urip Prayitno SH.MH yang hadir dalam jumpa pers ini menyebutkan, dalam melakukan kajian nanti,

pihaknya akan didampingi tim dari akademisi, untuk melakukan kajian secara menyeluruh terkait dampak lingkungan dari akses jalan yang dipaksakan ter integrasi. Sedangkan langkah hukum yang siap diambil jika terjadi pembongkaran tembok pembatas, adalah melakukan somasi kepada Dishub Propinsi Jatim, terkait kajian AMDAL Lalin di kawasan jalan perumahan Mutiara Regency. Pasalnya, jalan perumahan mutiara regency ini masih dalam lingkungan kajian AMDAL Lalin Dishub Kabupaten Sidoarjo, karena belum sepenuhnya terhubung sebagai jalan Propinsi. “Kita laporkan penyalahgunaan wewenang, karena kajian Madal Lalin jalan perumahan ini bukan ranah kewenangan Dishub Propinsi Jatim. Kita siap juga laporkan ke ombudsman terkait kebijakan yang berpyensi merugikan masyarakat,” tutup Urip.(Abidin)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Hadiri Rakor Forkopimda Jatim, Bupati H.Subandi Perkuat Kolaborasi Wujudkan Kesejahteraan Sidoarjo



seputarindonesiatv.id || **Sidoarjo** - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan pentingnya memperkuat sinergi lintas sektor antara unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari tingkat provinsi hingga kecamatan. Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan, kerukunan, dan ketertiban di seluruh wilayah Jawa Timur. Pernyataan itu disampaikan Khofifah saat membuka Rapat Koordinasi Forkopimda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Forkopimcam se-Jawa Timur di Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa (4/11/2025). Kegiatan ini dihadiri jajaran lengkap Forkopimda Plus Jatim, termasuk Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kajati, Kepala Pengadilan Tinggi, serta seluruh unsur Forkopimda kabupaten/kota dan Forkopimcam.

Bupati Sidoarjo H.Subandi hadir bersama jajaran Forkopimda, Forkopimcam yang turut mengikuti jalannya rapat koordinasi sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi lintas sektor di daerah. Dalam arahnya, Khofifah menyoroti dua isu krusial di bidang hukum dan keamanan. Pertama, ia mendorong penguatan "Rumah Restoratif Justice" yang dijalankan Kejaksaan Negeri bersama pemerintah daerah. "Rumah restoratif justice tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menjadi solusi jangka panjang," jelasnya.





Kedua, Gubernur memberikan atensi khusus pada ancaman penyalahgunaan narkoba yang ia kategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Ia meminta seluruh jajaran agar tidak meremehkan ancaman ini di semua lini. "Jangan pernah under-estimate (meremehkan) baik produksi, peredaran, maupun penyalahgunaannya. Kita perlu memperkuat fasilitas rehabilitasi dan menambah jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL)," tegas Khofifah.

Khofifah juga memaparkan perlunya pembagian peran yang terkoordinasi dalam menjaga ketahanan pangan di Jatim. "Program pangan harus sinergis. Di TNI AD fokus pada padi, Kepolisian pada jagung, dan TNI AL pada kedelai-palali. Semua harus nyekrup dan dikoordinasikan dengan kepala daerah," pungkasnya.

Usai kegiatan, Bupati Sidoarjo H. Subandi menyampaikan bahwa Pemkab Sidoarjo siap menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur dengan memperkuat koordinasi lintas sektor di wilayahnya. "Sebagaimana pesan Gubernur Jatim, kita akan memperkuat kolaborasi Forkonimda hingga ke level kecamatan. Ketahanan wilayah bukan hanya soal keamanan, tetapi juga ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat," ujar H. Subandi. H. Subandi menambahkan, komitmen Forkonimda Sidoarjo adalah memastikan keamanan wilayah tetap terjaga sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui sinergi program antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan lembaga terkait lainnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tingkatkan Kesiapsiagaan, Satgas TMMD ke-126 Sidoarjo dan RSUD Karsa Husada Batu Ajarkan Pertolongan Pertama di SDN Kedondong 1



seputarindonesiatv.id || **Sidoarjo**, Selasa (4 November 2025) — Dalam rangka mendukung kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-126, Kodim 0816/Sidoarjo melalui Babinsa Koramil 0816/05 Tulangan bersama tim medis RSUD Karsa Husada Batu melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) bagi siswa SDN Kedondong 1, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB ini mendapat sambutan hangat dari para guru dan siswa. Sejak pagi, halaman sekolah tampak ramai oleh antusiasme anak-anak yang ingin belajar cara menolong teman mereka ketika terjadi kecelakaan kecil di sekolah.

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari pihak sekolah dan dilanjutkan penyampaian materi oleh dr. Ahmad Surojul Millah, Dokter Ahli Pertama RSUD Karsa Husada Batu, yang hadir bersama enam tenaga medis lainnya. Turut hadir pula Direktur RSUD Karsa Husada Batu, Dr. dr. Muhammad Rizal, MM, MKes, Kepala Sekolah SDN Kedondong 1, Ibu Agustina Eri Cahyani, S.Pd, Perawat Desa Kedondong, Ibu Tyias, serta Babinsa Koramil 0816/05 Tulangan. Dalam pemaparannya, dr. Ahmad Surojul Millah menegaskan pentingnya pemahaman dasar tentang pertolongan pertama, terutama bagi tenaga pendidik yang sehari-hari berinteraksi dengan anak-anak. "Tindakan cepat dan tepat pada saat terjadi kecelakaan kecil, seperti luka, mimisan, atau pingsan, dapat mencegah kondisi yang lebih parah. Pengetahuan ini seharusnya dimiliki oleh semua warga sekolah," jelasnya.





Tak hanya teori, tim medis juga memberikan demonstrasi langsung tentang cara menangani luka ringan, mimisan, serta langkah-langkah pertolongan bagi siswa yang pingsan atau jatuh di lingkungan sekolah. Sesi simulasi tersebut berlangsung interaktif dan disambut antusias oleh para siswa yang tampak bersemangat mencoba mempraktikkan teknik sederhana yang baru mereka pelajari. Sementara itu, Dan SSK TMMD Kodim 0816/Sidoarjo, Letda Inf Rafly Fathoni, menyampaikan apresiasinya terhadap kerja sama lintas sektor yang terialin dalam kegiatan ini. "Edukasi seperti ini sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama di lingkungan pendidikan. Harapannya, para siswa dan guru bisa lebih sigan dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat," ujamya. Kegiatan edukatif ini merupakan bagian dari program non-fisik TMMD ke-126 Kodim 0816/Sidoarjo, yang tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesehatan masyarakat di pedesaan.

Melalui kegiatan ini, semangat manunggalnya TNI dengan rakyat kembali terwujud dalam bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kesehatan generasi muda. Diharapkan, pengetahuan yang diperoleh para siswa dan guru SDN Kedondong 1 dapat menjadi bekal berharga dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan tanggap terhadap keadaan darurat. Editor : Sundary